

## **Nepotisme Politik Kekuasaan dan Upaya Pemecahannya**

**Beni Ahmad Saebani<sup>1</sup>,Adrian Farhan Mubarok<sup>2</sup>**

[beniahmadsyaebani210468@gmail.com](mailto:beniahmadsyaebani210468@gmail.com) [adrianfarhann@gmail.com](mailto:adrianfarhann@gmail.com)

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

### **Abstract**

Nepotism in Indonesia is a complex phenomenon and rooted in the culture of kinship and the patronage system. One of the most common patterns of nepotism in Indonesia is the appointment of officials and staff based on family or relative relationships, not on the basis of qualifications or competencies. Various strategic positions in the government are filled by family members or close relatives of political officials. Effective and strong law enforcement can dispel the practice of nepotism. Strengthening the capacity of law enforcement agencies and internal oversight mechanisms in each institution will ensure that every case of nepotism is handled seriously and transparently. Cultural change and institutional governance are important aspects in efforts to overcome nepotism. It is also important to conduct ethics education and training for all employees and public officials that includes an understanding of the negative impact of nepotism and the importance of integrity in decision-making. It is also necessary that continuous ethics training can build awareness and commitment to fair practices. Through ethics education, organizations can build a culture of integrity that rejects all forms of nepotism. Increasing transparency in the decision-making process is an important step to reduce nepotism by providing open access to information about the recruitment, promotion, and procurement process. Transparency in the administrative process can reduce the likelihood of nepotism and increase public trust. Organizations must adopt policies that encourage information disclosure and ensure that every decision taken can be held accountable. An effective complaint channel can improve the detection and handling of nepotism cases. Effective monitoring and evaluation mechanisms are needed to overcome nepotism. The use of technology will increase scrutiny of nepotism practices, as technology can increase efficiency and transparency in human resource management, reduce subjective intervention in decision-making processes and ensure that every decision is based on objective data so that at a consistent and sustainable level of implementation it will help build a fairer system and increase public trust in institutions.

**Keywords:** Nepotism, Politics, Power

### **Abstrak**

Nepotisme di Indonesia merupakan fenomena yang kompleks dan berakar dalam budaya kekerabatan serta sistem patronase. Salah satu pola nepotisme yang paling umum di Indonesia adalah pengangkatan pejabat dan staf berdasarkan hubungan

keluarga atau kerabat, bukan berdasarkan kualifikasi atau kompetensi. Ragam jabatan strategis dalam pemerintahan diisi oleh anggota keluarga atau kerabat dekat pejabat politik. Penegakan hukum yang efektif dan kuat dapat menghalau praktik nepotisme. Penguatan kapasitas lembaga penegak hukum dan mekanisme pengawasan internal pada setiap institusi akan memastikan bahwa setiap kasus nepotisme ditangani dengan serius dan transparan. Perubahan budaya dan tata kelola lembaga sebagai aspek penting dalam upaya mengatasi nepotisme. Penting juga melakukan pendidikan dan pelatihan etika bagi seluruh karyawan dan pejabat publik yang mencakup pemahaman tentang dampak negatif nepotisme dan pentingnya integritas dalam pengambilan keputusan. Juga diperlukan pelatihan etika yang berkelanjutan dapat membangun kesadaran dan komitmen terhadap praktik yang adil. Melalui pendidikan etika, organisasi dapat membangun budaya integritas yang menolak segala bentuk nepotisme. Meningkatkan transparansi dalam proses pengambilan keputusan adalah langkah penting untuk mengurangi praktik nepotisme dengan menyediakan akses informasi yang terbuka mengenai proses perekrutan, promosi, dan pengadaan. Transparansi dalam proses administrasi dapat mengurangi kemungkinan terjadinya nepotisme dan meningkatkan kepercayaan publik. Organisasi harus mengadopsi kebijakan yang mendorong keterbukaan informasi dan memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan. Saluran pengaduan yang efektif dapat meningkatkan deteksi dan penanganan kasus nepotisme. Mekanisme pengawasan dan evaluasi yang efektif diperlukan untuk mengatasi nepotisme. Pemanfaatan teknologi akan meningkatkan pengawasan terhadap praktik nepotisme, karena teknologi dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan sumber daya manusia, mengurangi intervensi subjektif dalam proses pengambilan keputusan dan memastikan bahwa setiap keputusan berdasarkan pada data yang objektif sehingga pada tataran implementasinya yang konsisten dan berkelanjutan akan membantu membangun sistem yang lebih adil dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi.

**Kata Kunci :** Nepotisme, Politik, Kekuasaan

## Pendahuluan

Fenomena nepotisme tidak hanya menciptakan ketidakadilan dalam distribusi kesempatan kerja dan sumber daya, tetapi juga merusak integritas dan efisiensi institusi politik. Nepotisme dapat mengakibatkan penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, dan penurunan kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah. Menurut Transparency International (2019), nepotisme adalah salah satu bentuk korupsi yang paling sulit diatasi karena berakar pada budaya dan struktur sosial-politik. Nepotisme sering kali tersembunyi di balik hubungan personal dan jaringan patronase yang kuat, sehingga sulit dideteksi dan diberantas.

Dalam sosiologi politik, nepotisme dipahami sebagai bagian dari analisis kekuasaan yang lebih luas. Cronin (1996) berpendapat bahwa kekuasaan tidak hanya dapat dipahami sebagai sesuatu yang dimiliki oleh individu atau kelompok, tetapi

sebagai fungsi dari jaringan relasi antar subjek. Pergeseran ini mengarah pada pemahaman kekuasaan yang lebih kompleks, di mana kekuasaan beroperasi melalui berbagai mekanisme sosial, termasuk praktik nepotisme. Max Weber, salah satu tokoh utama dalam sosiologi politik, menggambarkan konsep kekuasaan patrimonial sebagai bentuk kekuasaan di mana hubungan personal dan loyalitas individu lebih diutamakan daripada aturan dan prosedur formal (Weber, 1922). Kekuasaan patrimonial ini sering kali menjadi dasar bagi praktik nepotisme, di mana keputusan-keputusan politik didasarkan pada hubungan personal daripada meritokrasi.

Pandangan masyarakat modern, nepotisme merupakan pergeseran fokus analisis kekuasaan dari kekuasaan yuridis (*sovereign power*) kepada kekuasaan disipliner (*disciplinary power*) juga relevan. Menurut Foucault, kekuasaan disipliner beroperasi melalui normalisasi perilaku dan pengawasan yang diinternalisasi dalam tubuh individu, bukan hanya melalui otoritas hukum (Foucault, 1975). Kekuasaan disipliner berfungsi dalam dan terhadap setiap relasi sosial, ekonomi, keluarga, dan seksualitas, dan dapat membantu menjelaskan bagaimana nepotisme beroperasi sebagai bagian dari mekanisme pengendalian sosial yang lebih luas.

Nepotisme ini menjadi masalah serius yang menghambat perkembangan demokrasi dan pemerintahan yang bersih. Di negara-negara berkembang, nepotisme merupakan penyebab ketidakstabilan politik dan ekonomi, memperkuat ketimpangan sosial dan ekonomi, serta melemahkan institusi demokratis. Studi oleh Acemoglu dan Robinson (2012) menunjukkan bahwa negara-negara dengan tingkat nepotisme tinggi cenderung memiliki institusi yang lemah dan rentan terhadap krisis politik dan ekonomi. Namun, nepotisme bukanlah fenomena yang terbatas pada negara-negara berkembang. Pada negara-negara maju, praktik ini juga dapat ditemukan dalam berbagai bentuk, baik di sektor publik maupun swasta. Misalnya, politik Amerika Serikat, tuduhan nepotisme sering muncul dalam konteks pengangkatan pejabat tinggi yang memiliki hubungan keluarga dengan petahana politik. Hal ini menunjukkan bahwa nepotisme adalah masalah global yang memerlukan pemecahan masalah.

Dampak nepotisme dalam struktur kekuasaan politik dapat dianalisis dalam perspektif sosiologi politik dengan mengidentifikasi terminologi dan pola nepotisme, memahami mekanisme yang menimbulkan praktik politik nepotisme, terutama pada negara berkembang seperti Indonesia yang dipandang telah terjebak dalam politik kekuasaan yang nepotis menurut sebagian pengamat politik dan bagi pendukungnya hal itu bukan nepotisme melainkan kebangkitan kaum milineal dalam berpolitik atau regenerasi politik.

### **Nepotisme dalam Politik Kekuasaan di Indonesia**

Nepotisme di Indonesia merupakan fenomena yang kompleks dan berakar dalam budaya kekerabatan serta sistem patronase. Praktik ini sering terjadi di berbagai tingkatan pemerintahan dan partai politik, serta memiliki dampak signifikan terhadap kinerja dan integritas institusi politik. Salah satu pola nepotisme yang paling umum di Indonesia adalah pengangkatan pejabat dan staf berdasarkan hubungan

keluarga atau kerabat, bukan berdasarkan kualifikasi atau kompetensi. Ragam jabatan strategis dalam pemerintahan diisi oleh anggota keluarga atau kerabat dekat pejabat politik.

Praktik nepotisme dalam pengangkatan pejabat lokal memengaruhi efektivitas birokrasi, dapat menimbulkan penurunan kinerja dan profesionalisme. Pejabat yang diangkat melalui nepotisme cenderung kurang kompeten (Siregar,2018). Nepotisme dalam politik Indonesia erat kaitannya dengan jaringan patronase, hubungan personal dan loyalitas menjadi lebih penting daripada kemampuan atau integritas. Jaringan patronase ini biasanya terbentuk melalui hubungan keluarga dan kerabat, yang kemudian digunakan untuk menguatkan posisi dan kekuasaan politik. Sehingga keputusan politik dan administratif dibuat berdasarkan hubungan personal yang pertimbangannya kurang objektif.

Jaringan patronase di Indonesia menciptakan sistem politik balas budi atau bagi-bagi kueh seputar kroni-kroninya, terutama bagi-bagi proyek yang lebih menguntungkan kepentingan kelompoknya yang akan dapat menghambat meritokrasi dan dapat meningkatkan risiko korupsi serta penyalahgunaan kekuasaan. Jaringan patronase akan menguatkan status quo dan menghadang generasi yang kompeten dan profesional hanya karena tidak ada relasi dengan penguasa tertentu. Distribusi proyek pemerintah dengan landasan nepotisme dapat mengakibatkan proyek yang tidak efisien dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Siregar,2018). Proyek kurang berkualitas dikarenakan penanggung jawab dan pelaksananya yang tidak kompeten dan kurang berpengalaman, yang lebih krusial lagi dapat menimbulkan praktik korupsi yang akan merugikan negara.

### **Dampak Nepotisme pada Ekonomi**

Nepotisme dalam politik Indonesia memiliki dampak yang luas terhadap struktur sosial dan ekonomi. Praktik nepotisme mengakibatkan ketidakadilan dalam penempatan sumber daya dan peluang kerja dikarenakan terdapat perlakuan khusus untuk keluarga dan kerabat pejabat dalam memperoleh proyek, jabatan, atau kontrak pemerintah dengan mengesampingkan individu kompetensi dan kualitas sumber daya manusia secara umum. Secara sosiologis akibat nepotisme sebagaimana pada tabel berikut:

**Tabel 1**  
**Dampak Nepotisme secara Sosiologis**

<b>N0</b>	<b>DAMPAK NEPOTISME</b>
1	Kolusi
2	Korupsi
3	Kompetensi yang buruk
4	Tidak Profesional
5	Hilang kesempatan sumber daya manusia yang lain
6	Pemeliharaan hubungan keluarga dan kerabat
7	Ketimpangan sosial dan ekonomi

Hidayat dan Setiawan (2021) mengungkapkan bahwa pada tingkat lokal, nepotisme menciptakan kesenjangan sosial yang signifikan. Pejabat yang mengangkat anggota keluarganya kedalam posisi strategis sering mengabaikan kualifikasi dan kemampuan profesional yang mengakibatkan penurunan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik. Ketidakadilan ini menimbulkan marginalisasi sosial dan ekonomi, memperburuk perekonomian masyarakat, dan keadaan politik yang sulit untuk stabil. Terjadinya monopoli proyek pemerintah sementara perusahaan yang jauh dari relasi nepotisme akan berusaha mendekati pemilik kekuasaan dengan cara yang melanggar hukum, misalnya dengan suap dan gratifikasi. Santoso (2022) menjelaskan bahwa nepotisme dalam distribusi proyek pemerintah menghambat inovasi dan efisiensi pada sektor ekonomi bahkan proyek yang dikuasai dengan sistem nepotisme akan menimbulkan pembengkakan biaya dan penurunan kualitas sehingga merugikan anggaran negara dan memperlambat pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik, serta mengurangi daya saing ekonomi nasional.

Nepotisme dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan institusi publik. Praktik nepotisme akan menimbulkan frustrasi sosial dan apatis masyarakat untuk melibatkan diri dalam pembangunan bangsa dan negara, atau menurunkan integritas dan transparansi pengelolaan pemerintahan. Bahkan menurut Sutrisno (2020) nepotisme dapat merusak nilai-nilai keadilan dan transparansi dalam pemerintahan yang akan menciptakan budaya korupsi dan memperburuk kondisi sosial, juga akan meningkatkan ketidakpuasan dan ketegangan sosial. Masyarakat yang termarginalkan akan cenderung pasif dalam pembangunan dan pengawasan pemerintahan, hal demikian akan merugikan masa depan bangsa dan negara.

### **Nepotisme dalam Kehidupan Sosial Politik**

Salah satu dampak utama dari nepotisme adalah ketidakadilan sosial, karena nepotisme cenderung mengabaikan prinsip meritokrasi dan kualifikasi individu, sehingga menghambat mobilitas sosial dan menjauhkan kesempatan yang sama antara masyarakat yang kuat relationalitasnya dengan yang lemah. Menurut Sari (2021) nepotisme memperburuk ketidaksetaraan sosial dengan memberikan prioritas kepada keluarga atau kerabat pejabat, mengabaikan individu yang lebih berkualitas dan berkompeten. Akibatnya, kesempatan untuk perbaikan sosial dan ekonomi bagi individu yang lebih terampil menjadi terbatas, memperkuat ketimpangan di berbagai lapisan masyarakat. Bahkan nepotisme akan meningkatkan tingkat korupsi dalam institusi publik. Ketika jabatan publik diberikan berdasarkan hubungan keluarga atau kedekatan pribadi, kualitas layanan publik semakin tidak profesional, berbelit-belit dan menimbulkan kejengkelan sosial.

Kurniawan dan Setiawan (2020) mengatakan bahwa nepotisme menempatkan orang pada posisi strategis berdampak negatif pada efisiensi dan efektivitas layanan publik dikarenakan pengambilan keputusan bukan berdasarkan kemampuan atau kualifikasi, tetapi lebih pada hubungan personal. Hal ini akan mengurangi kualitas pelayanan publik sehingga kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah dan

swasta akan menurunkan. Masyarakat akan kehilangan kepercayaan terhadap integritas dan transparansi lembaga pemerintahan manakala suatu keputusan penting lebih berdasarkan pada hubungan pribadi daripada kompetensi dan profesionalitasnya (Ramadhan,2019).

Pemahaman tersebut menimbulkan dampak yang buruk kepada kelangsungan pembangunan bangsa dan negara. Dampak yang demikian dapat dikemukakan dengan tabel berikut:

**Tabel 2**  
**Dampak Nepotisme secara Politis**

N0	Dampak Politik
1	Kekuasaan yang rapuh
2	Kebijakan penguasa yang kurang tegas
3	Upaya memperpanjang kekuasaan dalam hubungan keluarga dan kerabat
4	Tebang pilih dalam menerapkan sanksi hukum kepada pelaku kejahatan
5	Merumuskan peraturan perundangan yang sarat dengan kepentingan kelompoknya
6	Penyalahgunaan kewenangan
7	Memperburuk pelayanan publik

Menurut Prabowo dan Santosa (2022) nepotisme dapat menggantikan sistem pemilihan yang adil dengan sistem yang berdasarkan pada hubungan kekeluargaan, mengurangi akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan. Hal ini akan menghambat reformasi politik yang diperlukan untuk meningkatkan integritas dan efektivitas institusi publik. Fauzi (2021) berpendapat bahwa keterlibatan oknum pejabat dalam nepotisme biasanya akan melawan upaya reformasi yang dapat mengancam kekuasaannya atau kekuasaan keluarganya, sehingga cita-cita reformasi akan terhambat. Wibowo (2020) mengatakan bahwa konflik yang terkait dengan nepotisme akan memperdalam ketegangan sosial dan politik, menciptakan perpecahan sosial dan politik bahkan dapat merusak struktur pemerintahan dan meningkatkan ketidakstabilan sosial dan politik secara sistematis dan masif.

### **Upaya Mengatasi Nepotisme**

Bahaya yang ditimbulkan oleh nepotisme memerlukan pemecahan dengan pelbagai strategi dan cara, baik melalui reformasi kebijakan dan regulasi, perubahan budaya organisasi, maupun mekanisme pengawasan dan evaluasi. Beberapa cara solutifnya sebagaimana pada tabel berikutnya :

**Tabel 3**  
**Upaya Mengatasi Dampak Nepotisme**

N0	Solusi	Langkah yang dilakukan
1	Reformasi Kebijakan dan Regulasi	Membuat kebijakan atau regulasi yang tegas melarang praktik nepotisme pada sektor publik dan swasta. Mewajibkan transparansi dalam proses perekrutan dan promosi, menetapkan sanksi yang tegas bagi pelanggar

		aturan. Penegakan hukum yang ketat untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi anti-nepotisme. Pengawasan dan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran bagi pelaku nepotisme konsekuensi sanksi hukum yang pasti dan adil.
2	Perubahan Budaya dan Tata Kelola Lembaga	Pembentukan komite pengawasan independen memantau dan mengevaluasi praktik nepotisme. Komite tidak terlibat langsung dalam proses perekrutan dan promosi. Sistem pengaduan perkara nepotisme yang aman dan objektif.
3	Mekanisme Pengawasan dan Evaluasi	Komite pengawasan yang independen, akuntabilitas dan mengurangi peluang nepotisme. Komite pengawasan memiliki wewenang untuk melakukan investigasi dan memberikan rekomendasi perbaikan. Evaluasi berkala dan audit dalam mengidentifikasi dan mengatasi nepotisme. Melakukan evaluasi dan audit berkala terhadap kebijakan dan praktik pengelolaan sumber daya manusia dengan mengidentifikasi potensi pelanggaran nepotisme secara proaktif. Analisis proses perekrutan dan promosi untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan anti-nepotisme.

Menurut Rachmawati (2020), kebijakan yang jelas dan tegas mengenai nepotisme untuk mengurangi kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan. Regulasi yang baik akan mencakup definisi yang jelas tentang apa yang dianggap sebagai nepotisme dan mekanisme pelaporan yang efektif bagi mereka yang ingin melaporkan pelanggaran. Selain itu, implementasi sistem keadilan dalam perekrutan dan promosi jabatan kunci untuk mengurangi nepotisme. Sistem meritokrasi harus berdasarkan kepada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja individu. Dengan keputusan yang diambil berdasarkan kriteria objektif. Suryanto dan Agustin (2021) menunjukkan bahwa sistem meritokrasi yang kuat dapat membantu memitigasi pengaruh nepotisme dengan memastikan bahwa individu yang dipilih untuk posisi tertentu yang paling memenuhi syarat dan kompeten.

Menurut Setiawan (2019), penegakan hukum yang efektif dan kuat dapat menghalau praktik nepotisme. Penguatan kapasitas lembaga penegak hukum dan mekanisme pengawasan internal pada setiap institusi akan memastikan bahwa setiap kasus nepotisme ditangani dengan serius dan transparan. Perubahan budaya dan tata kelola lembaga sebagai aspek penting dalam upaya mengatasi nepotisme. Penting juga melakukan pendidikan dan pelatihan etika bagi seluruh karyawan dan pejabat publik yang mencakup pemahaman tentang dampak negatif nepotisme dan pentingnya integritas dalam pengambilan keputusan. Amalia dan Wahyudi (2021) menekankan bahwa pelatihan etika yang berkelanjutan dapat membangun kesadaran dan komitmen terhadap praktik yang adil. Melalui pendidikan etika, organisasi dapat membangun budaya integritas yang menolak segala bentuk nepotisme.

Meningkatkan transparansi dalam proses pengambilan keputusan adalah langkah penting untuk mengurangi praktik nepotisme dengan menyediakan akses informasi yang terbuka mengenai proses perekrutan, promosi, dan pengadaan. Nugroho (2020) menunjukkan bahwa transparansi dalam proses administrasi dapat mengurangi kemungkinan terjadinya nepotisme dan meningkatkan kepercayaan publik. Organisasi harus mengadopsi kebijakan yang mendorong keterbukaan informasi dan memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan. Hadi dan Sari (2022) mengungkapkan bahwa saluran pengaduan yang efektif dapat meningkatkan deteksi dan penanganan kasus nepotisme. Selain itu, penting untuk memastikan bahwa setiap laporan ditindaklanjuti dengan investigasi yang transparan dan adil.

Mekanisme pengawasan dan evaluasi yang efektif juga diperlukan untuk mengatasi nepotisme. Kartika dan Rachmawati (2020) menyarankan bahwa evaluasi rutin dapat membantu dalam mendeteksi potensi pelanggaran dan memperbaiki kelemahan sistem. Pemanfaatan teknologi akan meningkatkan pengawasan terhadap praktik nepotisme. Teknologi, seperti sistem manajemen sumber daya manusia yang transparan dan berbasis data, dapat membantu dalam melacak keputusan perekrutan dan promosi serta memastikan kepatuhan terhadap kebijakan yang ada. Sulaiman dan Rizki (2022) berpendapat bahwa teknologi dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan sumber daya manusia, mengurangi intervensi subjektif dalam proses pengambilan keputusan dan memastikan bahwa setiap keputusan berdasarkan pada data yang objektif sehingga pada tataran implementasinya yang konsisten dan berkelanjutan akan membantu membangun sistem yang lebih adil dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi.

## **Kesimpulan**

Nepotisme kekuasaan menimbulkan kerugian bagi semua elemen bangsa, terutama generasi muda yang akan memikul tanggung jawab melanjutkan pembangunan bangsa dan negara. Solusi untuk mengentaskan nepotisme kekuasaan adalah meningkatkan kesadaran hukum, kesadaran politik yang bersih, dan kesadaran sosial tentang tanggung jawab bersama untuk masa depan bangsa. Oleh karena itu, semua pemegang kekuasaan baik pada lembaga legislatif maupun pemerintah harus menjadi teladan bagi masyarakat sebagai warga negara, dengan membuat peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang pasti, kuat, dan tegas yang melarang perilaku nepotisme dalam semua kelembagaan negara maupun lembaga lainnya seperti BUMN. Peraturan perundangan yang dimaksud harus didukung oleh sistem hukum yang kuat, struktur hukum, aparat penegak hukum, lembaga peradilan, lembaga pendidikan, masyarakat hukum dan budaya hukumnya, dengan demikian, upaya membasi kekuasaan nepotisme dilakukan dengan serius, terbuka, dan selalu diawasi serta dievaluasi oleh lembaga yang independen.

## **Daftar Pustaka**

- Acemoglu, Daron, and James A. Robinson. " *Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty* " . New York: Crown Business, 2012.
- Amalia, D., and Wahyudi, H. "Pendidikan Etika dan Budaya Integritas di Organisasi." 10, no. 2 (2021): 123-135.
- Cronin, Patrick. " *The Politics of Power: An Introduction to Political Sociology* " . London: Routledge, 1996.
- Foucault, Michel. " *Discipline and Punish: The Birth of the Prison* " . Translated by Alan Sheridan. New York: Vintage Books, 1975.
- Hadi, A., and Sari, N. " Sistem Pengaduan yang Efektif dalam Mengatasi Nepotisme." 15, no. 4 (2022): 78-90.
- Hidayat, Ahmad, and Setiawan, Rizky. " *Nepotisme dan Ketimpangan Sosial di Tingkat Lokal: Studi Kasus di Provinsi X.* " , no. 1 (2021): 45-67.
- Kartika, A., and Rachmawati, Y. Evaluasi Rutin dan Audit Kebijakan Anti-Nepotisme. *Jurnal Manajemen dan Pengawasan* 8, no. 3 (2020): 150-162.
- Kurniawan, B., and Setiawan, S. Dampak Nepotisme Terhadap Efisiensi Layanan Publik. *Jurnal Administrasi Negara* 12, no. 1 (2020): 45-57. [Jurnal Administrasi Negara]
- Nugroho, T. Transparansi Proses Administrasi dalam Mencegah Nepotisme. *Jurnal Reformasi Administrasi* 7, no. 2 (2020): 99-112.
- Prabowo, M., and Santosa, R. Nepotisme dan Dinasti Politik di Indonesia: Implikasi Demokrasi. *Jurnal Politik dan Sosial*, 14, no. 1 (2022): 23-35. [Jurnal Politik dan Sosial]
- Prasetyo, J. Komite Pengawasan Independen dan Akuntabilitas Organisasi, *Jurnal Pengawasan Publik* 11, no. 2 (2021): 87-100. [Jurnal Pengawasan Publik]
- Rachmawati, I. Regulasi Anti-Nepotisme: Kebijakan dan Implementasi. *Jurnal Kebijakan Publik* 16, no. 1 (2020): 30-42.
- Ramadhan, D. "Pengaruh Nepotisme terhadap Kepercayaan Publik terhadap Institusi." *Jurnal Komunikasi dan Sosial* 13, no. 3 (2019): 56-67.
- Santoso, Budi. " *Dampak Nepotisme terhadap Efisiensi Ekonomi dan Kualitas Proyek Pemerintah.* " *Ekonomi dan Bisnis* 10, no. 2 (2022): 123-139. [Ekonomi dan Bisnis]
- Sari, F. Nepotisme dan Ketidaksetaraan Sosial di Indonesia. *Jurnal Sosial dan Kesejahteraan*\* 9, no. 2 (2021): 144-157.
- Setiawan, M. Penegakan Hukum dan Pencegahan Nepotisme. *Jurnal Hukum dan Penegakan* 13, no. 4 (2019): 67-79.
- Siregar, Marwan. " *Nepotisme dan Kinerja Birokrasi: Studi Kasus di Kota X* " . Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2018. [Penerbit Universitas Indonesia] <https://www.ui.ac.id/penerbit>
- Sulaiman, A., and Rizki, F. Pemanfaatan Teknologi dalam Pengawasan Nepotisme. *Jurnal Teknologi dan Administrasi* 6, no. 3 (2022): 115-126.
- Suryanto, R., and Agustin, L. "Sistem Meritokrasi dan Pengaruhnya terhadap Nepotisme." *Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia* 10, no. 1 (2021): 101-113
- Sutrisno, Andi. Nepotisme dan Kepercayaan Publik: Dampaknya terhadap Transparansi Pemerintahan di Provinsi Y. *Jurnal Administrasi Publik* 15, no. 3

(2020): 89-105. Transparency International. Global Corruption Report 2019. Berlin: Transparency International, 2019. [Transparency International]  
<https://www.transparency.org/en/global-corruption-report>

Weber, Max. Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology, Edited by Guenther Roth and Claus Wittich. Berkeley: University of California Press, 1922.

Wibowo, H. Polarisasi Politik dan Dampak Nepotisme. \*Jurnal Politik dan Sosial\* 12, no. 2 (2020): 98-110.